

EDITORIAL

Agar MRT Melaju Mulus

Peresmian dimulainya proyek pembangunan *mass rapid transit* (MRT), Rabu lalu, harus menjadi momentum yang tak boleh hilang percuma. Sudah terlalu lama proyek ini tertunda. Persiapannya pun maju-mundur berkali-kali hingga warga Jakarta skeptis. Dengan peresmian proyek MRT itu, setidaknya sudah ada kepastian.

Sekarang tantangan terbesar yang harus dihadapi Gubernur DKI dan direksi PT MRT adalah memastikan semua cetak biru proyek berjalan sesuai dengan rencana. Jangan sampai proyek ini mengulang kegagalan proyek monorel, yang konstruksinya telah menjadi monumen pengotor Jakarta.

Setidaknya ada dua hal yang harus dicermati agar megaprojek senilai Rp 15,7 triliun ini tak layu sebelum berkembang. Pertama, konsorsium pemenang tender—Obayashi-Shimizu, Jaya Konstruksi, Wijaya Joint Venture serta Sumitomo Mitsui Construction, dan Wijaya Karya—harus mampu menjalankan tugasnya tepat waktu. Termasuk harus dipastikan bahwa anggaran untuk konstruksi nanti tak membengkak akibat kesalahan kalkulasi.

Kedua, memulai program sosialisasi bagi warga Jakarta. Program ini tak kalah penting dibandingkan dengan proses konstruksi, karena hambatan pembangunan justru bisa muncul dari sini. Penolakan warga Jalan Fatmawati atas proyek ini, misalnya, harus segera menjadi perhatian. Ruas Fatmawati adalah ruas vital. Di sini terhampar area perdagangan berupa toko-toko dan mal. Di kawasan inilah kelak sebagian rel MRT bakal berada di atas tanah, menggeser bangunan dan toko yang sudah lama ada.

Gubernur dan pelaksana proyek tak cukup hanya meminta kesadaran warga agar rela tergeser. Perlu ada dialog dengan mereka karena, pada dasarnya, mereka tidaklah menolok pembangunan MRT, melainkan mempersoalkan dampak dan ganti rugi dari pembangunan proyek itu. Ada dampak ekonomi yang harus dihitung dengan cermat akibat terhentinya kegiatan perdagangan, ada pula dampak lingkungan yang tak bisa diremehkan.

Gubernur perlu menggerakkan unit-unit terkecil dalam hierarki pemda DKI—kelurahan, misalnya—untuk menyampaikan kerja besar ini kepada warga kota. Dialog dengan warga perlu lebih intensif, penjelasan tentang ganti rugi dan cara menangani dampak lingkungan yang bakal muncul juga mesti gamblang. Pemda pun harus mampu konsisten mengawal proyek ini jika semua ketentuan pembangunan telah dipenuhi namun penolakan tetap terjadi.

Yang juga penting adalah memastikan bahwa, pada tahap konstruksi, dampak kemacetan bisa seminimal mungkin. Untuk soal ini, manajemen lalu lintas yang mumpuni dibutuhkan. Pelaksana proyek bisa belajar dari pengalaman pembangunan jalan layang Antasari, yang berhasil meminimalkan kemacetan. Tentu, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro sangat penting.

MRT memang proyek raksasa dengan biaya mahal. Meski dana sebagian besar berasal dari pinjaman lunak Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), kelak semua itu tetap harus dilunasi. Kegagalan mengoperasikan MRT tidak hanya menyebabkan utang itu tak terbayar, tapi juga membuat warga Jakarta makin putus asa menghadapi kemacetan. Jika MRT dengan dana begitu besar dan persiapan begitu lama pun gagal, proyek apa lagi yang bisa diharapkan untuk mengatasi kronisnya kemacetan Ibu Kota? ●